

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan Undang undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- ....., *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan hukum tanah, penerbit Universitas Trisakti, Cetakan I, 2014*
- HS, Salim, Nurbaini Erlis Septiana, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Rajagrafindo, cetakan ke-3, Jakarta, 2014
- Hutagalung, Arie S., , Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2002
- Limbong, Bernhard, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, penerbit Kencana, Jakarta 2005
- Parlindungan, AP., Komentor Atas Undang-Undang Perumahan Dan Pemukiman Dan Undang-Undang Rumah Susun, Mandar Maju, Bandung, 2001,
- Rusli, Hardijan, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common law, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Cetakan I, 1993
- Santoso, Urip , Hukum Perumahan , Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2014,
- Satrio, J, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya, 1992, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sihombing, Irene Eka, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Universitas Trisakti, Jakarta, 2008
- Soetomo, 1981, Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak Dan Sertifikat, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang-Indonesia
- Soedharyo Soimin SH, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, Mei 2003
- Suardi, Hukum Agraria, Badan Penerbit Iblam, Jakarta 2005
- Sutedi, Adrian , Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Sumardjono, Maria, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Buku Kompas, Jakarta, 2001

Tehupeiory Aartje, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Penerbit Raih Asa Sukses, Cetakan I, Jakarta, 2012

Yulfasni, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta 200

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20/1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya

Undang-undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Keputusan Presiden No.55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden No.71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diubah dengan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Perpres no.71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal

Keputusan Menteri Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 tahun 2015 tentang izin lokasi

Peraturan Daerah Kota Depok No.13 tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan

### C. Jurnal, makalah, artikel

Etty Soesilowati, Kebijakan Perumahan Dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban  
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Dinamika Vol. 16, 1

Santoso, Urip, Pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan swasta, Jurnal Hukum  
Pro Justitia, Oktober 2010, volume 26 No.2, Universitas Airlangga Surabaya.

Senduk, Sylvana Ellen *Lex et Societatis*, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan  
Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012  
(*Land Acquisition For Development For Public Interest Based On Law No. 2  
In 2012*) Vol. III/No. 5/Juni/2015 44

Zaidar, Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan /  
Permukiman, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum BPHN tentang “Pelaksanaan Pengadaan  
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”

### D. Website

[www.biro-apbn-Setjen DPR RI](http://www.biro-apbn-Setjen DPR RI), di unduh pada hari selasa tanggal 5 Januari 2016  
pukul 13.00 Wib Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN-SETJEN  
DPR-RI

<http://sp2010.bps.go.id/> , diunggah tanggal 3 Nopember 2015 jam 17.00 wib

[www.housing-estate.com](http://www.housing-estate.com) di Jakarta, diunduh, diunduh hari Jumat  
(31/7/2015) jam 17.00 Wib

[http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kota.depok/BAB  
%20II%20Buku%20Putih%20Depok.pdf](http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kota.depok/BAB%20II%20Buku%20Putih%20Depok.pdf) Buku Putih Kota Depok, Bab II,  
halaman 12, diunduh pada tanggal 25 Desember 2015 jam 17.00

<http://www.limapuluhkotakab.go.id/berita-tujuan-penerbitan-izin-lingkungan.html>  
diunduh pada tanggal 25 Desember 2015 jam 17.00

[http://www.hukumproperti.com/2013/06/25/analisis-mengenai-dampak-  
lingkungan-untuk-lalu-lintas-dalam-kaitannya-dengan-hukum-properti/](http://www.hukumproperti.com/2013/06/25/analisis-mengenai-dampak-lingkungan-untuk-lalu-lintas-dalam-kaitannya-dengan-hukum-properti/)  
diunduh pada tanggal 25 Desember 2015 jam 17.00

[https://galuhwardhani.wordpress.com/2010/03/08/makalah-bab-ii-materi-subyek-  
dan-obyek-hukum/](https://galuhwardhani.wordpress.com/2010/03/08/makalah-bab-ii-materi-subyek-dan-obyek-hukum/) diunduh tanggal 25 januari 2016, jam 06.00 wib

<http://monumenkata.blogspot.co.id/2014/08/badan-hukum-dan-kedudukan-badan-hukum.html>, diunduh tanggal 25 januari 2016, jam 06.00 wib

<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/pengertian-badan-hukum.html>\_  
diunduh tanggal 25 januari 2016 jam 06.00

<http://monumenkata.blogspot.co.id/2014/08/badan-hukum-dan-kedudukan-badan-hukum.html>, diunduh tanggal 25 januari 2016, jam 06.00 wib

<http://serbaserbi properti-abproperty.blogspot.co.id/2013/10/wali-kota-depok-nurmahmudi-tidak-peduli.html>, Walikota Depok Nurmahmudi tidak peduli perda perumahan akan membatasi daya beli rakyat miskin, diunduh tanggal 30 desember 2015 jam 19.00 Wib

<https://www.google.com/search?q=komhanas+menolak+perda+no.13+tahun+2013+kota+depok&ie=utf-8&oe=utf-8>, rugikan warga depok dan investor komnas ham tegaskan perda bimb harus direvisi , Neraca ,Senin, 13/07/2015, diunduh tanggal 30 Desember 2015

<https://www.google.com/search?q=komhanas+menolak+perda+no.13+tahun+2013+kota+depok&ie=utf-8&oe=utf-8>, rugikan warga depok dan investor komnas ham tegaskan perda bimb harus direvisi , Neraca ,Senin, 13/07/2015, diunduh tanggal 30 Desember 2015

